

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

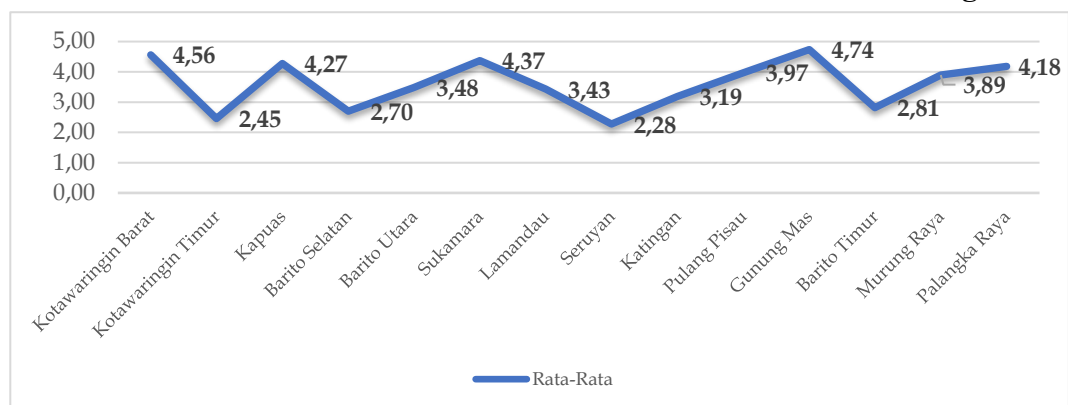
Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan krusial yang menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan suatu bangsa. Adanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang maksimal tentu akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam suatu negara. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tentu menjadikan hal ini sebagai poin perhatian agar mampu bersaing dengan negara-negara luar. Oleh karenanya, untuk mewujudkan misi tersebut, Indonesia harus menyiapkan strategi-strategi brilian agar mampu mencapai pembangunan dan pertumbuhan yang maksimal dimulai dari memperbaiki hal-hal genting di setiap daerah. Namun harus diakui bahwa dengan keterbatasan yang ada, pemerintah selaku pemangku kepentingan memiliki kesulitan yang cukup besar untuk menangani situasi ini. Perbedaan faktor-faktor produksi dan potensi ekonomi di setiap daerah tak jarang menimbulkan situasi ketimpangan.

Teori ekonomi Neo-Klasik dengan pendekatan Robert Solow dan Trevor Swan menyatakan bahwa akumulasi modal serta pengembangan teknologi merupakan kunci utama dari sebuah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Akumulasi modal dapat dilihat dari gabungan antara sumber daya manusia dan alam, sementara pengembangan teknologi dinilai dari kemunculan inovasi-inovasi dan produktivitas di bidang ekonomi (Todaro & Smith, 2006). Hal ini kemudian menimbulkan

hipotesis bahwa wilayah yang dikatakan maju dan memiliki modal melimpah akan mengalami *diminishing return* setelah mencapai titik jenuh, mengakibatkan terjadinya pengurangan keuntungan marginal dari tambahan modal, sebaliknya daerah tertinggal justru akan semakin menunjukkan keuntungan modal yang lebih besar dari investasi baru. Sehingga teori ini memaparkan bahwa efisiensi pasar adalah langkah paling tepat untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu panjang, dimana artinya pembentukan harga atas pemberlakuan pasar bebas (permintaan dan penawaran secara organik) dinilai lebih berdampak pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Meiriza dkk., 2023).

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sejatinya akan terbentuk dengan maksimal dengan adanya pemerataan dan keadilan. Salah satu wilayah potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan nilai PDB nasional adalah wilayah Kalimantan Tengah. Berikut adalah grafik rata-rata pertumbuhan ekonomi antar 14 kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2020-2024.

Gambar 1.1. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2025.

Adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir menjadikan sebuah tanda tanya mengenai wilayah Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah pada masing-masing daerahnya. Sebagai salah satu penghasil minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia, Kalimantan Tengah tidak hanya bertumpu semata-mata pada satu sektor saja, melainkan sektor lain seperti perkebunan karet, pertanian, kelautan, dan lain sebagainya pun cukup untuk menopang keberlangsungan wilayah ini. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tidak hanya mendominasi struktur ekonomi lokal, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menopang aktivitas ekonomi dan sumber penghidupan masyarakat daerah.

Gambar 1.2. Lapangan Usaha Ekonomi Utama Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Per-2023

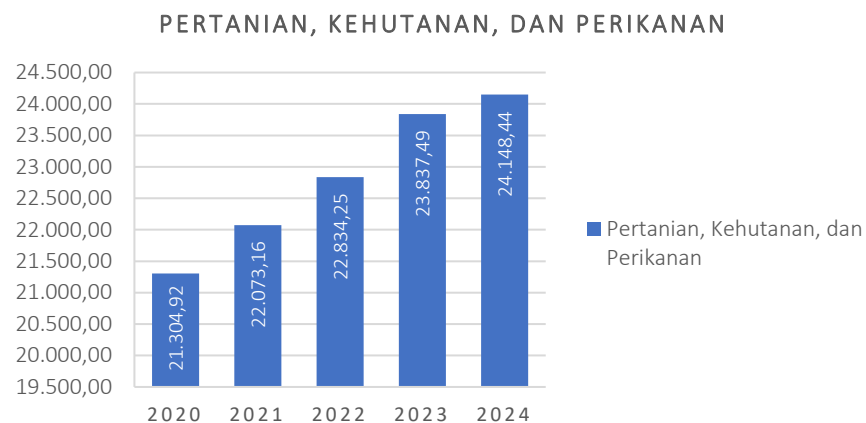


Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2024

Meski demikian, beberapa subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih belum ditonjolkan sebagai sektor yang potensial untuk menopang aktivitas ekonomi wilayah. Padahal, sektor PKP merupakan

salah satu sektor yang menyumbangkan kontribusi cukup besar dan terus mengalami peningkatan dalam PDRB Kalimantan Tengah selama lima tahun terakhir, hal ini dapat terlihat pada grafik berikut.

**Gambar 1.3 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Pada PDRB Kalimantan Tengah 2020-2024**



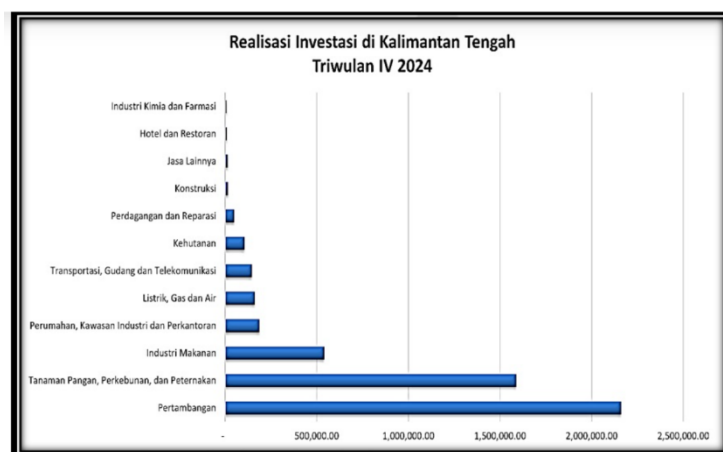
Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2025.

Berkaca pada grafik tersebut, sektor ini tentunya perlu dikembangkan sebagai prioritas utama dalam pembangunan ekonomi di wilayah Kalimantan Tengah. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2019) menerangkan bahwasanya kenaikan output pada sektor pertanian akan mendorong terjadinya penurunan persentase kemiskinan kabupaten/kota, sehingga hal ini dinilai sebagai potensi yang nyata untuk dikembangkan dengan serius oleh wilayah Kalimantan Tengah. Keterkaitan antara peningkatan output pertanian dengan pengentasan kemiskinan ini menunjukkan bahwa penguatan subsektor PKP tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga pada kesejahteraan sosial masyarakat. Kemampuan ini tentunya akan menimbulkan efek domino yang sangat

menguntungkan, mengingat investasi yang ditawarkan pada sektor PKP sebagai sektor primer pun mendapatkan sokongan yang cukup besar dari para investor setiap tahunnya.

Namun demikian, jika dilihat lebih jauh, pola realisasi investasi di Kalimantan Tengah belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi subsektor PKP. Dikutip dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah (2025), realisasi investasi pada triwulan ke IV tahun 2024 di Kalimantan Tengah sejatinya masih didominasi oleh sektor primer dengan capaian 3,85 triliun rupiah. Dominasi tersebut sebagian besar disumbang oleh subsektor pertambangan yang menjadi favorit para penanam modal asing maupun domestik, sementara subsektor PKP seperti tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan meskipun masuk tiga besar, masih belum mendapatkan perhatian proporsional jika dibandingkan dengan potensinya.

Gambar 1.4. Realisasi Investasi Kalimantan Tengah Triwulan IV 2024



Sumber: DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah, 2025

Kondisi ini mengisyaratkan adanya kesenjangan antara potensi subsektor PKP dengan prioritas pengembangan yang dilakukan selama ini. Meski mendapatkan input berupa investasi yang cukup memadai pada setiap kabupaten/kota, perlu digarisbawahi potensi subsektor PKP masih belum terpetakan secara jelas sebagai sektor unggulan di tiap-tiap wilayah. Adanya pemetaan yang tepat dalam konteks ini tentunya dapat membantu dalam mengidentifikasi subsektor basis yang mampu dikembangkan oleh tiap-tiap kabupaten/kota, sehingga investasi yang ada dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kata lain, tanpa adanya pemetaan yang akurat, potensi lokal sangatlah rentan terabaikan dan tidak berkembang secara optimal. Sebagaimana Allah SWT telah mengingatkan dalam QS. Al-A'raf [7]: 10 sebagai berikut.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.*

Berdasarkan ayat tersebut dapat kita lihat bahwa bumi telah dianugerahkan dengan berbagai sumber penghidupan, namun hanya sedikit yang mampu bersyukur. Maka, pemetaan subsektor PKP bukan sekadar langkah teknis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dalam mengelola nikmat tersebut. Sayangnya, belum semua wilayah mampu merefleksikan rasa syukur itu dalam bentuk pengelolaan sumber daya yang efisien dan produktif. Adanya ketidakseimbangan antara input ekonomi dan

output yang dihasilkan mendorong perlunya evaluasi atas kinerja ekonomi masing-masing wilayah secara lebih mendalam.

Pada kenyataannya, tidak semua wilayah dengan input besar menunjukkan output ekonomi yang sebanding. Beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Tengah tercatat memperoleh alokasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan belanja daerah yang tinggi, namun kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih belum optimal. Ketidakseimbangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pemanfaatan input yang tersedia. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa belum tentu besarnya input secara otomatis menjamin produktivitas ekonomi daerah, apabila tidak diikuti dengan perencanaan dan pemanfaatan sektor unggulan secara strategis. Oleh karenanya, urgensi untuk mengukur efisiensi kinerja ekonomi setiap wilayah menjadi penting, guna mengetahui sejauh mana input yang tersedia mampu dikonversi menjadi output yang maksimal melalui pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA).

Minimnya literatur yang secara khusus memetakan subsektor PKP sebagai potensi unggulan sekaligus mengaitkannya dengan efisiensi kinerja ekonomi daerah menjadikan penelitian ini memiliki posisi yang strategis dalam mengisi kekosongan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan DEA untuk mengukur efisiensi kinerja ekonomi wilayah sekaligus analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ), *Shift Share*, dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) dalam memetakan subsektor basis PKP dirasa perlu

untuk diintegrasikan guna memberikan kontribusi terhadap arah kebijakan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal yang efisien dan terukur. Berdasarkan observasi sementara yang dilakukan oleh penulis, maka skripsi ini kemudian diberi judul “Pemetaan Potensi Subsektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (PKP) Serta Kaitannya Dengan Kinerja Ekonomi di Kalimantan Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apa saja potensi basis subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan (PKP) di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ), *Shift-Share*, dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP)?
2. Seberapa besar tingkat efisiensi kinerja ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Tengah dalam mengelola investasi dan belanja daerah (input) terhadap PDRB (output) menggunakan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA)?
3. Seberapa besar keterkaitan antara potensi basis subsektor PKP dengan tingkat efisiensi kinerja ekonomi wilayah di Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengidentifikasi potensi basis subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan (PKP) di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan analisis *Dynamic Location Quotient* (LQ), *Shift Share*, dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP).
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Tengah dalam mengelola investasi dan belanja daerah (input) terhadap PDRB (output) menggunakan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA).
3. Untuk menganalisis keterkaitan antara potensi basis subsektor PKP dengan tingkat efisiensi kinerja ekonomi wilayah di Kalimantan Tengah.

D. Signifikansi Penelitian

Selain tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis: Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi ilmiah yang memperluas pengetahuan, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca, khususnya terkait pemetaan potensi subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta kaitannya dengan kinerja ekonomi wilayah Kalimantan Tengah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk memperkaya literatur di UIN Antasari Banjarmasin serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan hasil penelitian ini.

2. **Manfaat Praktis:** Penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi yang berguna bagi pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat guna, memberikan pandangan holistik tentang pemetaan potensi subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta kaitannya dengan kinerja ekonomi wilayah Kalimantan Tengah, memberikan dasar bagi pemangku kepentingan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif.
3. **Manfaat Akademis:** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pijakan akademis dan kerangka analitis bagi penelitian lanjutan, baik untuk mendalami aspek tertentu, menguji model yang sama di wilayah berbeda, maupun mengintegrasikan variabel atau pendekatan baru.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kemungkinan kekeliruan dan kesalahan dalam memahami maksud penelitian berjudul Pemetaan Potensi Subsektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PKP) Serta Kaitannya Dengan Kinerja Ekonomi di Kalimantan Tengah, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dalam bentuk definisi operasional sebagai berikut:

1. Pemetaan potensi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah proses identifikasi dan pengukuran tingkat keunggulan subsektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (PKP) di Provinsi Kalimantan Tengah guna mengetahui daya saing serta prospek pengembangannya. Secara operasional, pemetaan dilakukan melalui analisis kuantitatif tiga indikator utama, yakni *Dynamic Location Quotient* untuk menilai tren dan daya saing subsektor di suatu wilayah, *Shift–Share* untuk

mengungkap sumber pertumbuhan dan keunggulan kompetitif, serta Model Rasio Pertumbuhan (MRP) untuk membandingkan laju pertumbuhan subsektor dengan perekonomian acuan. Data yang digunakan berasal dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (PKP) yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, sehingga hasil akhir berupa pemeringkatan subsektor dapat menunjukkan kategori potensi tinggi, sedang, atau rendah secara terukur.

2. Subsektor pertanian dalam penelitian ini merujuk pada bagian dari sektor pertanian yang mencakup kegiatan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, jasa pertanian, dan perburuan. Dalam pengukuran operasional, subsektor ini diidentifikasi melalui data PDRB ADHK 2010 menurut lapangan usaha untuk subsektor yang termasuk kategori A – Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Badan Pusat Statistik. Pada penelitian ini, nilai PDRB subsektor pertanian akan digunakan sebagai dasar analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ), *Shift-Share*, dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP).
3. Subsektor kehutanan dalam penelitian ini mencakup kegiatan yang berhubungan dengan penebangan kayu, pengelolaan hutan, serta pengambilan hasil hutan bukan kayu, seperti rotan, damar, dan getah. Secara operasional, subsektor ini diukur melalui nilai PDRB ADHK

2010 pada kategori lapangan usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, sebagaimana ditetapkan oleh BPS. Data ini dianalisis untuk mengidentifikasi dinamika kontribusi subsektor kehutanan sebagai sektor basis pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Subsektor perikanan adalah bagian dari sektor primer yang meliputi usaha penangkapan ikan di laut dan perairan umum, budidaya perikanan (ikan, udang, dan komoditas perairan lainnya), serta jasa penunjang perikanan. Dalam penelitian ini, subsektor perikanan diukur menggunakan data PDRB ADHK 2010 yang diklasifikasikan oleh BPS dalam kategori Perikanan.
5. Kinerja ekonomi wilayah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai tingkat kemampuan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengelola sumber daya ekonomi (input) untuk menghasilkan output ekonomi. Secara operasional, kinerja ekonomi wilayah dalam penelitian ini diukur menggunakan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan model VRS-BCC (*Variable Return to Scale*) berorientasi input. Variabel input meliputi investasi Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan realisasi belanja daerah, sedangkan variabel output adalah nilai PDRB ADHK 2010 Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masing-masing kabupaten/kota pada periode 2020–2024. Skor efisiensi DEA (0–1) menunjukkan tingkat efektivitas pengelolaan input untuk menghasilkan output.